

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Millennium Development Goals (MDGs) adalah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 untuk melaksanakan tujuan tersebut (KKP Semarang, 2021).

Keprihatinan yang sama juga melanda beberapa negara berkembang lainnya, yang menjadi titik perhatian dunia, khususnya organisasi dunia PBB, sehingga mendorong PBB mengeluarkan deklarasi dan pencaanangan MDGs, yang intinya bertujuan melaksanakan berbagai program pemerataan pembangunan, agar tingkat kemiskinan di dunia berkurang, bahkan bisa dihapuskan. Melalui komitmen seluruh bangsa- bangsa diharapkan negara maju membantu menyisihkan keuntungannya bagi kepentingan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara

berkembang. Hal ini didesak kenyataan bahwa saat ini di luar masalah terorisme dan Hak Azasi Manusia (HAM). Masalah dunia yang paling akut adalah menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam. Berawal dari keprihatinan inilah Jeffrey Sachs, Direktur Program MDGs PBB, melahirkan ide MDGs, melalui buku *The End of Poverty*, yang oleh beberapa pengkritiknya dinilai terlalu utopis (Yuningsih, 2007).

Program MDGs tentunya memberi secercah harapan bagi Indonesia, karena PBB diharapkan mendorong negara-negara maju untuk mengikuti skema mendanai pembangunan negara miskin. Namun masalahnya, akankah mereka melakukan hal tersebut dengan sukarela tanpa memiliki agenda politik tersendiri? Selain itu, bagaimana peran dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program MDGs? Solusi atas masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus diperhatikan lebih dari pemerintah dan seluruh warga masyarakat sendiri untuk menanggulunginya. Sangatlah tidak etis kalau kita hanya menadahkan tangan pada negara maju agar mengiur untuk GDP nasional dan mendanai pembangunan nasional, sementara kita sendiri berpangku tangan. Meskipun MDGs sendiri menunjukkan keberpihakan dan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kesenjangan tersebut (Yuningsih, 2007).

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya MDGs pada bulan September 2015 dibuatlah program lanjutan yaitu SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan

capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs yang sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun kearah yang lebih baik.

SDGs/ *Sustainable Development Goals* merupakan agenda mega global yang disepakati oleh para petinggi dunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dimana agenda ini adalah gerakan yang mengupayakan untuk menyejahterakan masyarakat dalam empat pilar utamanya yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan yang terakhir hukum dan tata kelola, yang kemudian menghasilkan 17 tujuan dan 169 target diperbaharui yang harus dicapai dalam tahun 2030 mendatang. SDGs diadakan dengan prinsip-prinsip kesepakatan dunia yang ditetapkan, dengan integrasi dan inklusif kemudian untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*" (BPK, 2021).

Indonesia juga ikutandil dalam melaksanakan SDGs dimana telah dibuktikan dengan ketetapan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Langkah yang diambil Pemerintah Indonesia ini agar berupaya tidak tertinggal lagi dalam SDGs, karena sebelumnya Pemerintah Indonesia pernah sempat tertinggal selama 10 tahun dalam mengikuti MDGs yang dilaksanakan pada tahun 2000, karena keterlambatan Indonesia waktu itu akibat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 (Hidayati, 2019).

Pada penyelenggaraan Kongres XIII dan HUT ke-61 IAI dalam meningkatkan peran inklusif akuntan profesional dalam perekonomian, terutama dalam upaya mencapai citacita mulia membentuk *welfare state* di Indonesia menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Akuntan Profesional bersama seluruh *stakeholders*

kebangsaan merupakan elemen kunci untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat sejahtera secara berkeadilan bisa dicapai secara optimal.

Kondisi ini menandakan bahwa sebagai organisasi profesi, IAI semakin mapan dan berpengaruh, ditopang infrastruktur kelembagaan yang makin baik dan dukungan berbagai pihak yang makin kuat. Namun IAI tidaklah berpuas diri atas semua pencapaian ini. Masih banyak program yang perlu direalisasikan dan dilanjutkan untuk memperkuat peran profesi membangun negeri. IAI harus mampu mengkapitalisasi kemampuan Akuntan Indonesia sebagai profesional yang memiliki kemampuan menjaga dan menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga menjadi bangsa yang disegani di dunia.

Sebagai organisasi profesi yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia, IAI memiliki tanggung jawab untuk menjamin orang-orang yang berhimpun di ranah keprofesian senantiasa memiliki kompetensi, integritas, serta kredibilitas. IAI telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan proses registrasi ulang Akuntan. Kewajiban Akuntan menjadi anggota IAI juga memberi amanah IAI untuk memastikan Akuntan anggota IAI memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar, serta dimonitoring ketaatannya dalam melaksanakan standar profesi dan kode etik. IAI juga melaksanakan kewenangannya untuk menerapkan penegakan disiplin untuk anggota, serta amanah lain yang dibebankan kepada IAI sebagai organisasi profesi dan *standard setter*.

Catatan pencapaian IAI itu tidak lepas dari kerjasama seluruh anggota DPN, Dewan Penasihat, Majelis Kehormatan, pengurus kompartemen, badan dan IAI wilayah untuk bersama-sama melaksanakan program kerja IAI.

Dinamika organisasi berhasil dilalui dengan dukungan seluruh unsur untuk melaksanakan program pengembangan organisasi dan penataan hubungan internal, pendanaan, ICT, hubungan internasional, kompetensi akuntan, peningkatan image IAI, kebijakan publik, konvergensi standar internasional, praktik sektor publik, stakeholder management, & PR, pengembangan pasar modal dan industri keuangan serta IAI Knowledge Center. Sebagai organisasi profesi akuntan, IAI senantiasa siap untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan berkomitmen untuk terus meningkatkan sumbangsih profesi Akuntan dalam turut memajukan perekonomian negara untuk menyejahterakan rakyat Indonesia menuju SDGs 2030 (IAI Global, 2018).

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo.

Dasar badan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palopo yang kemudian digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya ditindak lanjuti tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Posisi, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo (BPKAD, 2020).

BPKAD Kota Palopo juga berpengaruh dalam berjalannya SDGs yang ada di Kota Palopo mengingat, BPKAD adalah salah satu lembaga pengelola keuangan yang akan menjadi penyalur terjalannya program SDGs secara tepat sasaran. BPKAD Kota Palopo dapat menjalankan program SDGs sesuai dengan target yang sudah dikelompokkan kepada bagian akuntan, kemudian kondisi Kota Palopo saat ini bagaimana perkembangan yang mulai dalam menjalankan SDGs, mengingat program ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun ini.

BPKAD Kota Palopo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan pengadilan intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dibawah naungan Badan Pemeriksa Keuangan BPKAD tiap daerah harus memastikan pelaksanaan program kerja sesuai yang ditetapkan, dimana secara lebih rinci tanggung jawab BPK ialah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK, kemudian BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan pengujian meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional pemeriksa, termasuk penilaian resiko yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Palopo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi

yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palopo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti. PERAN BIDANG AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo).

1.2 Rumusan Masalah

Association of International Certified Professional Accountants Forum untuk Pembangunan Berkelanjutan mencatat bahwa “Profesi akuntansi yang kuat terdiri dari etika yang sangat terlatih professional.” Pentingnya akuntansi untuk menjalankan tujuan dari SDGs telah diakui oleh organisasi profesinonal internasional. Akuntan sangat berperan penting dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari peneliatian ini adalah: “Bagaimana peran akuntan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*?” (CGMA, 2018).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplorasi peran akuntan dalam proses mewujudkan *Sustainable Development Goals* yang telah berjalan dalam kurun waktu tujuh tahun ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penilitian dengan studi kasus rencana aksi global *Sustainable Development Goals* ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini, harapannya dapat mengetahui proses yang telah berjalannya rencana aksi global SDGs/TPB ini terkhusus para akuntan dalam mewujudkannya target yang diharapkan selesai pada tahun 2030 dengan meninjau dari Empat Pilar SDGs/TPB. Empat Pilar SDGs/TPB ini terdiri dari Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Seperti yang dikemukakan oleh *Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.* pada KONGRES XIII, bahwa peran akuntan dalam melaksanakan mewujudkan tidak hanya terikat pada Pilar Pembangunan Ekonomi tetapi terhadap semua Pilar SDGs/TPB yang ada, oleh karena itu dari sinilah diharapkan dengan melakukan penelitian ini semua harapan yang ingin dicapai para akuntan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan benar-benar pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bisa terwujud.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memperkaya ilmu dan mengetahui perkembangan yang terjadi terkhususnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Berkelanjutan yang berlangsung di Kota Palopo.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Palopo

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang persepsi mengenai peran akuntan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* sehingga dapat dijadikan evaluasi atau masukkan bahan dalam ajaran guna menindak lanjutkan perkembangan SDGs/TPB ini yang terbilang masih dalam proses pelaksanaan hingga tahun 2030 mendatang dan mengajarkan peran profesional para calon akuntan yang akan datang.

1.4.3 Manfaat Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan gambaran pemerintah dalam menyempurnakan persepsi kekurangan mengenai peran lembaga akuntan dalam mewujudkan SDGs/TPB di Indonesia. sehingga menjadi evaluasi kedepannya untuk para akuntan yang terlibat dalam melaksanakan SDGs/TPB dapat sepenuhnya patuh agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yang dibahas seputar *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Bekerlanjutan, oleh karena itu diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan. Peneliti membatasi penelitian ini pada :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada kantor Lembaga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

- b. Hasil penelitian ini berasal dari pengurus Lembaga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian dikaitkan sesuai kebutuhan dalam penelitian. Kerangka teori yang digunakan memiliki keterkaitan yang valid mengenai permasalahan serta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis dipastikan dapat menunjukkan pemahaman yang sesuai tentang teori dan konsep yang relevan dalam pengambilan topik penelitian, kemudian teori harus berkesinambungan sesuai bidang pengetahuan yang lebih luas atau yang sedang dipertimbangkan.

2.1.1 Teori *Triple Bottom Line*

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” (Yanti dan Rasmini, 2015). Elkington menyatakan bahwa selain mengejar profit, perusahaan harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hingga saat ini, konsep TBL juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Andrew Savitz (2006) dalam Slaper dan Hall (2011) menyatakan bahwa, TBL merupakan intisari

dari keberlanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia, termasuk profitabilitas dan pemegang saham, sosial, masyarakat, dan lingkungan.

Sedangkan Smith dan Sharicz (2011) menyatakan bahwa TBL merupakan,

“The result of the activities of an organization voluntary or governed by law, that demonstrate the ability of the organization to maintain viable its business operations (including financial viability as appropriate) whilst not negatively impacting any social or ecological systems.”

TBL merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. TBL dapat menjadi tolak ukur perusahaan, dengan tidak hanya memperhatikan sisi ekonomi, namun juga dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap sosial dan lingkungan (Ariastini and Semara, 2019).

Bahy (2017) menyatakan bahwa *triple bottom line* merupakan konsep adopsi dari atas konsep *sustainability development*, saat ini perusahaan secara sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan *sustainability report*. Laporan tersebut menguraikan dampak organisasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial, lingkungan. Salah satu model awal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun *sustainability report* mereka adalah dengan mengadopsi metode akuntansi yang dinamakan *triple bottom line*. Menurut John Elkington (1998) konsep *triple bottom line* merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang hanya membuat *single bottom line* tunggal yakni hasilhasil keuangan dari aktivitas ekonomi perusahaan (Hidayati, 2019).

Akuntan sebagai pembuat laporan keuangan menjadi penerjemah informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sehingga lebih transparan dan menunjang terpenuhinya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.1

Integrasi Teori *Triple Bottom Line*



Sumber: (Coşkun Aslan and Kısacık, 2017)

Pendekatan TBL menyarankan bahwa kriteria pengambilan keputusan juga harus mencakup sosial dan faktor lingkungan daripada hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan. (Winkler dkk, 2015:484). Konsep TBL, sebagai indikator keberhasilan, menerima bahwa keuntungan adalah masih penting tetapi juga menekankan bahwa lingkungan yang memungkinkan keuntungan dan orang-orang yang tinggal di lingkungan itu tidak boleh rusak. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan hasil lingkungan dan sosial selain hasil keuangan (Tokgöz dan Nce, 2009:264). Dengan kata lain, kinerja umum suatu perusahaan harus diukur dengan mengambil total kontribusi kesejahteraan ekonomi, lingkungan kualitas dan modal sosial sebagai basis (Žak, 2015). Tiga dimensi TBL yang dibentuk untuk melaporkan operasi ekonomi, sosial dan lingkungan dari perusahaan (Coşkun Aslan and Kısacık, 2017).

2.1.2 Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Sebagai posisi seorang akuntan yang baik dalam mengelola atau memahami kontribusi dalam menjalankan tugasnya maka dari kontribusinya suatu perusahaan atau lembaga yang dijalankannya akan terlaksana dengan baik. Melalui seorang akuntan perusahaan dapat mempromosikan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab kepada masyarakat yang mana juga disebutkan pada indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Syamsir, 2018).

2.1.3 Peran Akuntan

Definisi akuntansi menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (*users*) untuk pengambilan keputusan (Harry, 2018).

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah diperlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Akuntansi pemerintahan, peranan dari akuntansi pemerintahan serta Karakteristik Akuntansi Pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih di tekankan pada pencatatan, pelaksanaan anggaran Negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsinya yang sedemikian rupa maka disebut juga akuntansi anggaran.

Profesi akuntan kini menjadi bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan menuju cita-cita bangsa, membangun welfare state di Indonesia.

Profesi akuntan saat ini menjadi salah satu profesi yang akan tetap relevan dan reliable terhadap perubahan yang terjadi di era digital ekonomi. Pada saat prosedur standar dan metode telah banyak berubah, tujuan dan nilai-nilai akuntansi serta relevansinya dengan dunia bisnis akan tetap sama. Meskipun pada tingkat ketidakpastian yang belum pernah ada sebelumnya, akuntan dituntut untuk semakin adaptif dan fleksibel agar perannya sebagai penjaga integritas dan stabilitas perekonomian tetap handal. Berikut ini adalah peran akuntan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai inisiatif untuk memberikan kepemimpinan, keterampilan bisnis dan kewirausahaan dan pendidikan profesional yang relevan untuk memperluas jalur ke dalam profesi. Serta mengarahkan lebih banyak pada kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan.

2. Mempersempit kesenjangan gender

Organisasi akuntan di beberapa negara telah sepakat untuk berkontribusi dengan mempertahankan dan mengadvokasi perempuan memasuki berbagai macam profesi, tak terkecuali profesi akuntan, dengan berbagai macam program dan kemitraan.

3. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Akuntan menggunakan keterampilan profesional yang dimiliki untuk mendorong para pemimpin mengarahkan organisasi yang dijalankan menuju pencapaian kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, akuntan juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada kemakmuran yang lebih besar dan meningkatkan standar hidup secara lebih luas.

4. Meningkatkan Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Akuntan dalam hal ini dapat memberi dorongan kepada pemerintah dalam memberikan arahan untuk menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, meningkatkan nilai tambah, membuka kesempatan lapangan kerja dan menarik investor di sektor riil dan industrialisasi. Kemudian dapat menuntaskan permasalahan infrastruktur TIK dengan rendah karbon, terakhir meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi baru.

5. Mempromosikan Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Akuntan dalam sektor bisnis diharapkan dapat membangun tata kelola perusahaan dan rencana keberlanjutan terpadu yang mengoptimalkan proses bisnis, menghindari pemborosan dan menerapkan inovasi dan teknologi yang mampu mendorong efisiensi.

6. Memajukan Aksi Iklim

Dicanangkannya SDGs tahun 2015 profesi akuntan dapat mendukung pemerintah dan organisasi global dalam mengimplementasikan rencana untuk perubahan iklim. Dengan menggunakan pelaporan terpadu untuk lebih memahami risiko perubahan iklim, akuntan dapat membantu organisasi menyelaraskan tujuan dan sasaran bisnis mereka dengan persiapan untuk perubahan iklim.

7. Menjaga Perdamaian dan Keadilan

Tercerminnya masyarakat yang adil dan makmur berawal dari pemerintah dan perusahaan yang transparan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sering kali SDGs terhalang oleh kecurangan dan tindak korupsi yang kemudian dapat mencegah pertumbuhan bisnis, serta menghalangi investasi publik dan asing. Secara khusus, profesi akuntan turut membantu menjaga perdamaian dan keadilan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dalam membangun laporan keuangan perusahaan.

8. Menjaga Kemitraan dalam mencapai tujuan

Akuntan harus dapat mempertahankan kepada pemerintah agar terus dan meningkatkan optimalisasi negara, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDB), kemudian meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan memperkuat kerja sama pembangunan ketingkat internasional.

Tanpa peran akuntan, target-target SDGs mungkin hanya menjadi slogan dalam strategi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta. Dengan demikian peran akuntan sangat penting demi keberlangsungan Sustainable Development Goals (SDGs). Moldan dan Dahl (2007:2) memberikan pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang mampu mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi tidak terbatas (Febriyanti, 2019).

2.1.4 Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang mengupayakan menjaga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat secara luas, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional yang disepakati oleh berbagai penjurur negara dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, dimana TPB/SDGs mencakup 17 tujuan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	Deskripsi Tujuan
1	Tanpa Kemiskinan Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2	Tanpa Kelaparan Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4	Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar.
5	Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

6	<p>Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.</p>
7	<p>Energi Bersih dan Terjangkau</p> <p>Menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan, modern untuk semua.</p>
8	<p>Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p>
9	<p>Industri, Inovasi, dan Infrastruktur</p> <p>Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p>
10	<p>Berkurangnya Kesenjangan</p> <p>Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara</p>
11	<p>Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan</p> <p>Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh, dan berkelanjutan.</p>
12	<p>Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</p> <p>Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</p>
13	<p>Penanganan Perubahan Iklim</p> <p>Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.</p>
14	<p>Ekosistem Lautan</p> <p>Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
15	<p>Ekosistem Daratan</p> <p>Melindungi, merstorisasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p>
16	<p>Perdamaian , Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk</p>

	pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: (Kementerian PPN/ Bappenas, 2017)

Dari ke-17 tujuan yang terdapat dalam SDGs, menurut IFAC (2016), Makarenko dan Plastun (2017) dan Sorina-Geanina, Adriana, dan Ana-Maria (2018) ada delapan tujuan yang berkaitan dengan profesi akuntan yakni:

1. Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas
2. Tujuan 5 : Kesetaraan gender
3. Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
4. Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan infrastruktur
5. Tujuan 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
6. Tujuan 13: Penanganan perubahan iklim
7. Tujuan 16: Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Peneliti akan mengambil tujuh tujuan yang akan teliti dimana peneliti telah sesuaikan dengan penerapannya di Indonesia terkhususnya di Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan, serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Adapun dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, cukup banyak kinerja yang telah dicapai baik di tingkat global maupun nasional. Pencapaian di tingkat global antara lain Indonesia telah dua kali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) pada tahun 2017 dan 2019 dalam rangkaian *High-Level Political Forum* (HLPF) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menilai VNR 2017 Indonesia merupakan salah satu dari enam VNR terbaik di dunia. Oleh karenanya Indonesia diundang oleh PBB untuk mengikuti Investment Fair tahun

2018 untuk membahas berbagai proyek-proyek untuk pencapaian SDGs dengan para investor internasional. VNR Indonesia tahun 2019 juga mendapat penghargaan dari PBB terutama untuk laporan Goal 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh karena Indonesia menyusun laporan ini dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip inklusif. Di tingkat nasional, saat ini sudah dibentuk 19 SDGs Center yang didirikan di beberapa perguruan tinggi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2020, sebanyak 27 provinsi telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs dengan 11 provinsi diantaranya telah menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi (monev) RAD TPB/SDGs.

Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu kembali merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMN 2020-2024 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan Renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs (Kementerian PPN, 2020).

2.1.5 Empat Pilar Pembangunan SDGs/TPB

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari **17 Tujuan dan 169 target** dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Dalam mewejudukan SDGs ada Empat Pilar Pembangunan yang mengelompokkan 17 Tujuan yang ingin dicapai, adapun Empat Pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial

Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Pembangunan Sosial meliputi tujuan SDGs pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilar ini menekankan pada pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung

kemitraan. Pilar Pembangunan Ekonomi meliputi tujuan SDGs pada poin 7, 8, 9, 10, dan 17. Pilar ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi tujuan SDGs pada poin 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Pilar ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola meliputi tujuan SDGs pada poin 16. Pilar ini menekankan pada kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2 Tabel

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Wulandari, 2020)	Pengaruh Peran Akuntan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Terhadap Kontribusi Akuntan Dalam Pelaksanaan TPB	Desain penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif merupakan desain penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan bukti empiris tentang fenomena tertentu dengan menyertakan data kuantitatif maupun kualitatif dari objek yang diteliti	Hasil dari penelitian ini adalah seluruh responden memiliki tingkat ‘Tinggi’ pada peran akuntan dalam TPB dan kontribusi di dalam pelaksanaan TPB. Sehingga responden akuntan dalam penelitian ini sudah mengetahui peran akuntan di dalam TPB khususnya pada delapan <i>goals</i> yang disarankan IFAC dan kontribusi yang dilakukan responden dan lembaga dalam pelaksanaan TPB sudah tinggi. Sedangkan untuk uji pengaruh didapatkan bahwa peran akuntan dalam TPB memiliki pengaruh positif

			terhadap kontribusi akuntan dalam pelaksanaan TPB dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
(Febriyanti, 2019)	Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Di Era Ekonomi Digital	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan tinjauan literatur.	menentukan peran akuntan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengintegrasikan pendekatan yang berbeda untuk penataan peran akuntan profesional dalam pembangunan berkelanjutan. Serta mengembangkan lebih lanjut dari informasi dan dukungan akuntan dalam analisis pembangunan berkelanjutan diperlukan.
(Yuningsih, 2007)	Peran dan Komitmen Indonesia dalam “Millenium Development Goals”: (Perspektif Humas Internasional)	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan perspektif profesi pada keberlanjutan, lebih dikenal di bidang akuntansi sebagai tanggung jawab sosial	peran dan komitmen Indonesia dalam realisasi program MDGs, memerlukan terobosan-terobosan kreatif dari berbagai kalangan, baik kalangan politisi, bisnis, maupun masyarakat sipil lainnya, sebagaimana halnya eksperimen Grameen Bank di Bangladesh yang telah

		perusahaan.	menghasilkan upaya cemerlang untuk mengentaskan kemiskinan. Contoh-contoh kerja konkret dan buah pemikiran yang muncul dari kalangan masyarakat sebagai “embrio” agen perubahan sosial ekonomi, telah banyak bermunculan di seantero tanah air. Masalahnya adalah para “embrio” ini seringkali mengalami “keguguran” disebabkan faktor-faktor struktural dan situasional yang jangankan membidani, malah sebaliknya justru membuat rawan proses perkembangan dan kelahirannya.
(Hidayati, 2019)	Kontribusi Inklusif Akuntan Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (Sdgs)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang	Profesi akuntan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan agenda SDGs yang menjadi trend global saat ini untuk mensejahterahkan manusia, meningkatkan perekonomian dan perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, akuntan berkontribusi pada

		diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh berupa dokumen yang terkait dengan SDGs dan beberapa studi pustaka.	enam dari 17 tujuan SDGs
(Ali Alagla, 2019)	Governance and Auditing the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs): Challenges of the Preparedness Phase	Kajian ini mengadopsi paradigma eksploratif yang diistilahkan dengan interpretivisme yang diikuti oleh pendekatan kualitatif penelitian dan analisis di mana kumpulan data sekunder telah digunakan.	Penelitian ini mengingat inti dari Seminar GAB ke-15 dengan mengevaluasi dan mensintesis tema-tema utama yang terkait terhadap pelaksanaan SDGs baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis yang dibuat telah menunjukkan bahwa presentasi dan diskusi pada Seminar GAB ke-15 menunjukkan adanya kesiapan kelembagaan untuk melaksanakan SDGs dan bahwa ada kesiapan profesional untuk mengaudit pelaksanaan SDGs.
(Makarenko	The role of	Penelitian ini	Peran fungsional akuntan

and Plastun, 2017)	accounting in sustainable development	merupakan penelitian kualitatif menggunakan tinjauan literatur.	profesional dan posisinya jelas berkorelasi dengan gradasi pembangunan berkelanjutan perusahaan. Pada tingkat strategis akuntan menjalankan otoritas mereka sebagai pencipta nilai-nilai, pada tingkat operasi mereka bertindak sebagai penyedia nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dan pada pelaporan tingkat mereka bertindak sebagai penjaga dan reporter. Dengan demikian peran akuntan profesional dalam pembangunan berkelanjutan perlu direvisi sesuai dengan kondisi ekonomi baru.
(Roda et al., 2020)	Akuntan 4.0: Roda Penggerak Nilai Keberlanjutan Perusahaan Melalui <i>Artificial Intelligence & Tech Analytics</i> Pada Era Disruptif	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode deskriptif	Akademisi Oxford University, Michael Osborne dan Carl Frey, menunjukkan hasil yang mengejutkan terkait profesi akuntan (Osborne dan Frey, 2013). Akuntan memiliki risiko sebesar 94% mengalami otomatisasi dalam dua dekade ke

		digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian.	depan. Hasil tersebut dipicu oleh adanya perkembangan teknologi mutakhir, yaitu Artificial Intelligence (selanjutnya disebut AI
(Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, 2018)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi	Penelitian ini menggunakan dataprimer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner, observasi dari akuntan Indonesia yang telah bekerja lebih dari 5 tahun	Pemerintah dengan melibatkan <i>stakeholders</i> di ketiga <i>platform</i> lainnya, sudah melakukan banyak hal. <i>Pertama</i> , adalah pelibatan <i>stakeholders</i> dalam keikutsertaan penyusunan <i>SDGs</i> di tingkat global; sampai <i>SDGs</i> dideklarasikan pada bulan September 2015. <i>Kedua</i> , melakukan <i>mainstreaming SDGs</i> ke dalam RPJMN 2015-2019. <i>Ketiga</i> , melakukan analisa kesiapan data di Indonesia, sambil menunggu terbitnya indikator <i>SDGs</i> pada bulan Maret 2016. <i>Keempat</i> , melakukan penyusunan landasan hukum yang sudah diterbitkan pada bulan Juli

			2017 lalu.
--	--	--	------------

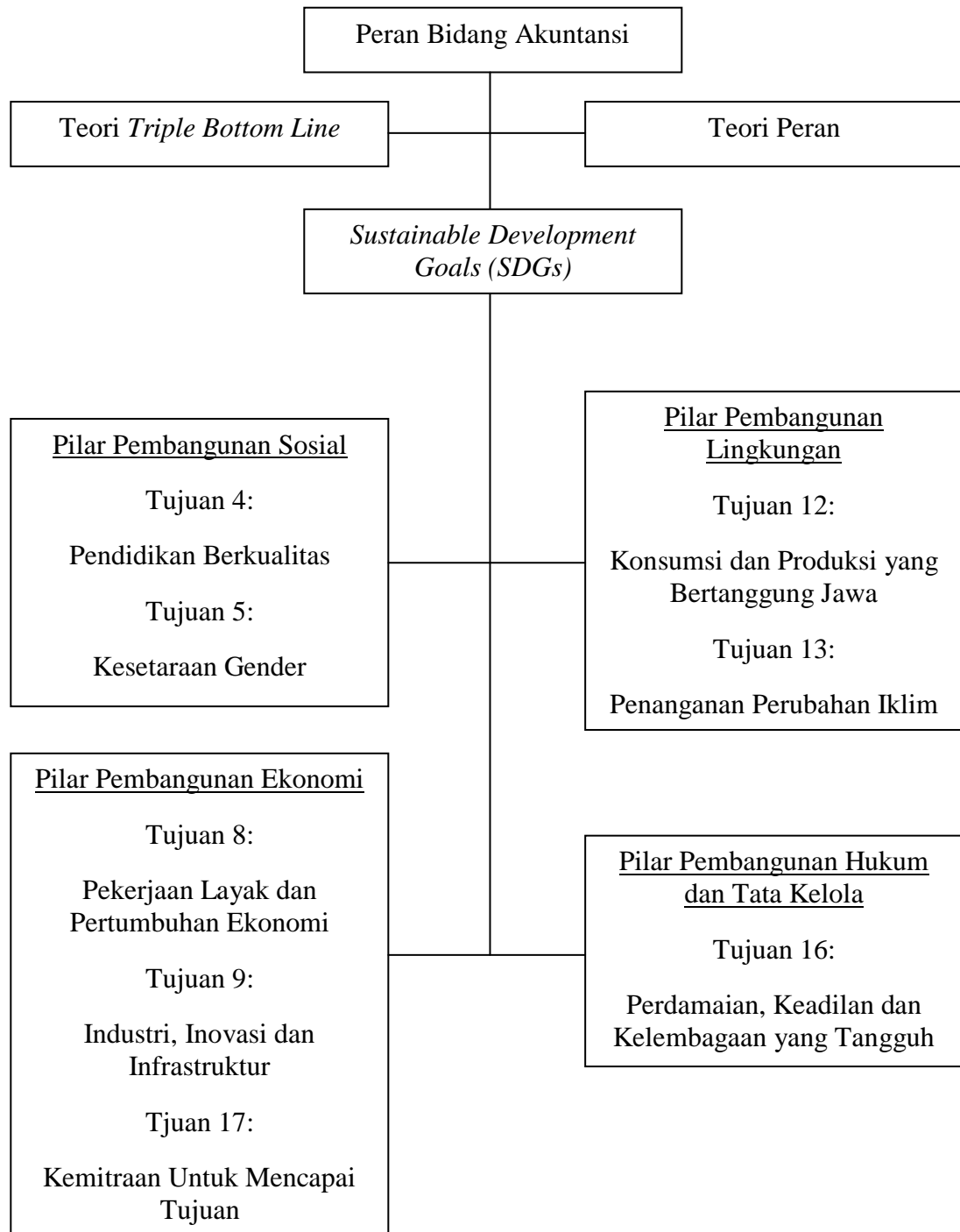
2.3 Kerangka Teori

Akuntan sendiri memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs (Nilsson, et all, 2016; Makarenko dan Plastun, 2017). Akuntan berperan sebagai “*value reporter*” yang melaporkan nilai-nilai perusahaan kepada stakeholder untuk menjaga perusahaan tetap pada komitmennya. Akuntabilitas adalah merupakan kunci dari informasi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh perusahaan sehingga tercapainya kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan *triple bottom line theory* sebagai landasan teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan untuk tetap seimbang dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Dan menggunakan teori peran untuk mengetahui lebih dalam mengenai pentingnya peranan dari akuntan.

Peran akuntan berfungsi agar memberikan informasi perihal akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan secara meluas, terpadu dan terus berkelanjutan dalam satu gagasan pelaporan, akuntansi yang ikut berkontribusi dalam wewangannya mengasi segala permasalahan yang ada seperti kirisis ekonomi dan sosial yang dapat disetarakan dengan penggunaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Adapun Kerangka Teori penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis, kegiatan ontologis ialah kegiatan yang berdasarkan dalam bukti nyata atau yang benar dilakukan di lapangan objek penelitian yang dituju. Kemudian data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Dr.farida Nugrahani, 2014). Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* dimana Paradigma positivisme biasanya hanya mengamati “permukaan” yang tampak tanpa memahami makna secara lebih dalam. Tujuan dari paradigma ini pun untuk mencapai generalisasi di mana faktanya ada hal-hal seperti perilaku manusia yang tidak bisa digeneralisasi dan akan tetap ada unsur subjektivitas, paradigma ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Irawan, 2019)

Pendekatan Deskriptif peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu yang akan ditentukan. Karena itu tidak selalu menuntut adanya hipotesis.(Soendari, 2018).

Penelitian deskriptif tidak memberi perlakuan khusus, dimana memanipulasi atau perubahan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti tidak akan diterima, melainkan murni dari apa yang ditemukan. Cara satu-satunya yang harus diberlakukan ialah memberikan data yang benar dari peneliti itu sendiri, yang didapatkan dari observasi ketempat penelitian, wawancara terhadap informan, dan dokumentasi bukti yang didapatkan. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif sebab penelitian ini berupaya mengeksplor fenomena proses implementasi *green accounting* yang didapatkan dari lembaga terkait dengan permasalahan masyarakat dan lingkungan sekitar, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *No One Left Behind*. Melalui program SDGs ini.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong 1999 bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal demi mendapatkan data yang sesuai dengan hal yang akan diteliti. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh BPKAD Kota Palopo dalam mewujudkan SDGs dalam kurun sisa 8 tahun dari target SDGs itu sendiri.

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka ditetapkan lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dan waktu penelitian dimulai pada tahun 2022.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*selfreport data*) yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap

berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

Pada penelitian yang dilakukan ini isitilah yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ialah informan. Penelitian ini memaparkan bentuk informan yang dapat dilihat dari segi kualitas informasi yang diberikan oleh informan bukan dari jumlah informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini. Informan penelitian di atas dapat terbilang cukup layak dan dapat memberi kepastian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Alasan dipilihnya informan ini ialah karena dalam penelitian dapat memberikan informasi yang valid dan sesuai bukti yang terjadi di lokasi penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Narasumber pada penelitian ini adalah para pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan yang bekerja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identitas Informan

No.	Nama	Jabatan
1	IMRAN, SE, M.Ec.Dev	Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
2	EMIL NUGRAHA SALAM, STP, MM	Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan
3	ANDI AMALIYAH, S.ST	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Catatan Informan :

1. Tidak memiliki gelar dalam bidang akuntansi tapi dipercaya dalam menangani bidang tersebut dalam pemerintahan.
2. Telah mengikuti berbagai pelatihan bidang akuntansi untuk meyakinkan posisi yang di berikan.
3. Mempunyai skill dan pelatihan yang didapatkan dalam bidang akuntansi sehingga dipercaya dalam menangani akuntansi pemerintahan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, Observasi ialah peninjauan langsung ke lapangan objek penelitian. Observasi menjadi proses utama untuk mengamati secara langsung kebenaran atau fakta yang ingin didapatkan dalam penelitian, selebihnya hasil yang didapatkan dirangkum atau dicatat mengenai temuan yang didapatkan ke dalam catatan.
2. Wawancara, Wawancara ialah proses menanyai langsung kepada informan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian, Wawancara juga dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan jawaban valid atas permasalahan yang ingin dipastikan kebenarannya. Tekni yang dilakukan dalam wawancara didasarkan atas keyakinan untuk mendapatkan laporan dari diri sendiri *self report* dimana agar meyakinkan peneliti dengan objek penelitiannya. Wawancara dapat dilakukan langsung ketempat tujuan penelitian dengan menemui informan yang diinginkan dalam penelitian atau dapat dikondisikan sesuai kesepakatan

kepada informan mengenai lokasi, dengan adanya data dari wawancara dapat menjadikan tolak ukur bagaimana informan dapat memberikan bukti dari informasi yang dipaparkan.

3. *Internet searching*, *Internet searching* adalah pengumpulan bahan informasi dari internet mengenai referensi yang tidak dapat didapatkan secara langsung di tempat penelitian, data dari internet juga dapat dijadikan informasi tambahan demi memperjelas hal yang diteliti, juga memastikan tidak asal melengkap data karena kebutuhan informasi harus sesuai yang dibutuhkan dan benar-benar hasil yang valid dari sumber terpercaya mengenai penelitian itu sendiri.
4. *Library research*, ialah pengumpulan data dari berbagai tempat dalam bentuk benda seperti buku atau jurnal terpercaya, dengan tujuan agar dapat menjadi data tambahan atau pelengkap dari referensi yang dibutuhkan, hal temuan dari teknik ini dapat menjamin kebenaran yang pasti, dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca dan mempelajari secara lengkap sumber yang ingin dikaitkan dalam penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data agar mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*).

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan memberi *check*. Namun karena penelitian ini menggunakan

berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi meliputi tiga hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan tiga dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi teori, ialah penggunaan berbagai teori yang berbeda untuk memastikan data yang didapatkan sudah menjamin atau memenuhi syarat yang dibutuhkan. Dalam hal ini teori *triple bottom line* dan teori peran untuk meninjau dan menghubungkan kontribusi akuntan terhadap program yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama teori yang digunakan tersebut dapat dikaji secara mendalam.
2. Triangulasi data, ialah memadukan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan memastikan kebenaran yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga didapatkan data yang kompleks yang akurat akan dari sumbernya-sumbernya.
3. Triangulasi metode, membandingkan informasi atau data yang didapatkan dengan cara menggunakan metode wawancara, *observasi*, dan *survei*. Untuk mendapatkan informasi yang terbukti benar dan handal dalam pengumpulannya agar menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan hasil data yang lebih ringkas dan padat.

3.8 Analisis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Data yang didapatkan dari hasil observasi langsung, wawancara kepada informan terkait, dan bantuan referensi dari *internet searching* dan *library research* dimana penelitian ini dilakukan analisis dengan analisis yang sesuai yaitu deskriptif dengan cara data yang didapatkan dikelola dengan mendeskriptifkan secara menyeluruh. Proses analisis ini dilakukan sejak data mulai dikumpulkan sampai selesainya penelitian dalam pengambilan data dari berbagai sumber. Berikut tahapan-tahapan dan penjelasan yang dilakukan dalam menganalisis data yang didapatkan:

1. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian dan berbagai tempat sesuai kesepakatan informan melalui observasi dan wawancara, dan melengkapi data yang kurang dengan *internet searching* dan *library research* agar lebih kompleks dan mudah dipahami oleh peneliti.
2. Reduksi data dilakukan agar dengan mendapatkan data yang dimana difokuskan dan ditelusuri secara detail mengenai materi penelitian, yang didapatkan dari berbagai sumber yang dibutuhkan dengan penyesuaian dari pokok masalah yang masukan dalam rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
3. Penyajian data adalah informasi yang telah didapatkan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan dalam membuat karya ilmiah agar dapat memahami tentang objek penelitian yang yang diamati dan meninjau lagi langkah apa yang akan dilanjutkan. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data

mengenai akuntan dengan keterkaitannya dalam melaksanakan SDGs .

Peneliti akan berpedoman pada *triple bottom line theory* dan teori peran.

4. Penarikan kesimpulan. Dimana adalah hasil akhir dari semua data yang didapatkan, kemudian peneliti merangkum beberapa poin seperti gejala yang diperoleh dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi selama melaksanakan penelitian, dan implikasi positif yang diharapkan dapat menjadi nilai baik terhadap peneliti selama penelitian dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Mengenai gambaran umum Kantor BPKAD Kota Palopo diuraikan dalam beberapa poin yakni :

1. Tentang Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, dalam penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah. Agar dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo.

Dasar lembaga ini terbentuk adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palopo yang kemudian digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya ditindak lanjuti tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

2. Kedudukan dan Tupoksi

a. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

b. Tupoksi

Secara umum Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan berdasarkan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palopo, maka ditetapkan Visi organisasi yaitu : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkualitas".

b. Misi

Untuk menetapkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatkan kualitas sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4. Tujuan dan Saran

a. Tujuan

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo yaitu :

1. Mewujudkan aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan kompetensi
2. Meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah
3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang memenuhi prinsip pelayanan publik.

b. Sasaran

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo Yaitu :

1. Meningkatnya dedikasi tanggung jawab, wawasan dan kompetensi aparat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2. Meningkatkan proporsi pendapatan daerah dalam pemenuhan kemandirian keuangan daerah
3. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan
4. Terpenuhinya pengelolaan aset daerah yang tepat, efisien dan efektif
5. Terwujudnya pelayanan pengelolaan dan manajemen aset daerah yang sederhana, jelas, aman bertanggung jawab dan mudah diakses.

4.2 Peran Bidang Akuntansi dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGS)*

SDGs yang terdiri dari 17 tujuan dengan karakteristik dari berbagai sektor akan mengait segala kalangan dimana semua profesi harus turut andil dalam pelaksanaannya, SDGs juga bergantung pada keahlian profesi untuk mengoptimalkan peluang, membangun sistem untuk memberikan hasil dan melaporkan kemajuan yang dibuat untuk mencapai tolak ukur pencapaian

kesejahteraan. Dari sisi profesi akuntan yang telah aktif secara global menurut Ernadhi bahwa inovasi sangat diperlukan untuk mendukung dan mengoptimalkan peran profesi akuntansi Indonesia terhadap perubahan-perubahan pesat yang terjadi menuju SDGs 2030, sehingga memerlukan dukungan berbagai pihak, khususnya seluruh organisasi akuntan di Indonesia, baik lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah di harapkan perannya dalam mengelola keuangan di setiap daerah dalam pencapaian SDGs, seperti yang dinyatakan dari dua informan dalam pandangan mereka terhadap SDGs yang sedang berjalan yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Berbicara soal pandangan bagi seorang akuntan dalam tataran lokal khususnya Kota Palopo untuk saat ini belum turut andil sepenuhnya dalam perencanaan pembangunan, dimana perencanaan masih jarang menggunakan laporan keuangan, yang seharusnya dalam laporan keuangan itu sendiri dapat diketahui perencanaan yang terjadi di suatu daerah”.

Untuk mencapai persoalan SDGs ini masih perlu lagi *update* lebih lanjut dalam berbagai hal, sebagai seorang akuntan dalam hal ini pengelola keuangan daerah hanya melakukan pengelolaan keuangan sesuai kondisi yang terjadi, dan sebagai seorang akuntan dalam mengelola keuangan untuk saat ini hanya bisa menggambarkan pencapaian tiap tahunnya apa yang telah dicapai dengan mengikuti perkembangan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Perihal pandangan sebagai akuntan atau pengelola keuangan dalam penganggaran samapai saat ini selalu mengikuti program yang sudah ada, dimana mendukung dengan cara yang professional, tapi dalam SDGs ini yang terjadi di era digitalisasi ini peran segala profesi sangat diperlukan

dalam pelaksanaannya, termasuk profesi akuntan dalam menganggarkan dan sebagainya. Perencanaan sesuai prosedur yang diberikan oleh pemerintah dalam melaksanakan program SDGs ini masih dalam tahap dikembangkan, Jadi untuk saat ini pengadaan program SDGs masih mengikuti perkembangan yang ada dan akan selalu diperbarui sesuai arahan yang diberikan atau yang diberlakukan kepada lembaga pengelola keuangan ini”.

Pernyataan dari informan pertama dan kedua menyebutkan dari pandangan masing-masing dimana masih dalam perkembangan yang akan terus menjadi perhatian utama sesuai dengan kebutuhan atau program yang sudah diberlakukan, Sedangkan SDGs di Kota Palopo sendiri masih dalam pengembangan, bagaimana memadukan profesi akuntan agar bisa diterapkan dan mengikuti program SDGs ini agar mulai dilaksanakan tanpa tertinggal dari daerah lainnya.

Meninjau dari pandangan masyarakat Indonesia perihal SDGs terkhususnya masyarakat di Kota Palopo yang dimana masih kurangnya kesadaran akan program SDGs ini, yang telah dijawab oleh kedua informan yang ada yakni :

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Melihat kondisi yang ada khususnya di Kota Palopo sendiri bisa dilihat sendiri masih kurangnya informasi tentang SDGs ini sendiri, jarang media yang meliput berita ini, kurangnya seminar tentang program ini, bahkan tidak menutup kemungkinan diluar kota Palopo atau di daerah lainnya juga mengalami hal yang sama”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Dari kondisi yang ada saat ini pengetahuan masyarakat perihal SDGs masih kurang, apalagi Indonesia sendiri masih terus berkembang jadi kurangnya informasi ke semua kalangan masyarakat masih belum terlihat atau tahu akan program SDGs ini, jadi tidak menutup kemungkinan baik di

Kota Palopo maupun di daerah lainnya sama masih kekurangan dalam informasi yang didapatkan”.

Pernyataan dari kedua informan mengungkapkan dimana masih kurangnya informasi perihal SDGs yang ada di Kota Palopo, dan kurangnya lagi masih perlunya pemberitahuan atau pengumuman secara meluas agar informasi perihal SDGs dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kemudian melihat tantangan yang ada terhadap seorang profesi akuntan dalam hal mengelola keuangan terhadap melaksanakan program agenda dunia SDGs yang telah diungkapkan oleh kedua informan yang menjawab yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Tantangan yang menarik disini ialah seorang akuntan harus bisa mengetahui perannya dalam menjalankan segala program yang ingin dicapai, kemudian akuntan harus tahu posisi mereka dalam hal ini sebagai pengelola keuangan daerah, jadi tentu saja pelaksanaan harus sesuai laporan yang ada tidak serta-merta mengeluarkan dana dalam melaksanakan suatu program apalagi jika berbicara perihal SDGs yang mencakup skala nasional tentu saja harus ada pengetahuan yang baik agar semua yang ditargetkan dalam pencapaian SDGs terlaksana dengan porsinya”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Untuk tantangan tentu saja ada hal yang menjadi acuan seorang akuntan untuk terus berusaha dalam menjalankan tugasnya, tapi tetap dalam prosedur yang ditetapkan dan tidak asal menjalankan tugas semauanya, dalam bidang penganggaran sendiri dalam melaksanakan program SDGs tentu saja harus melewati berbagai proses agar suatu program yang akan dianggarkan itu dapat disetujui atau tidaknya, sehingga dalam menganggarkan sesuatu tidak serta-merta mengeluarkan dana, jadi harus

ada yang menjadi landasan utama agar apa yang akan dianggarkan dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang diharapkan.”

Pernyataan kedua informan menjelaskan dimana tantangan yang ada bagi disetiap bidangnya ada sesuai tingkatnya, baik dalam akuntansi dalam pelaporannya maupun bidang penganggaran, dimana perihal *ouput* yang mereka harus anggarakan harus sesuai pelaporan yang diberikan, kemudian keduanya mengungkapkan perlu adanya laporan atau instruksi yang sesuai sehingga tidak asal dalam mengeluarkan biaya terhadap program yang akan dilaksanakan.

Kontribusi profesi akuntan ini telah diakui secara global yang mana IFAC pada tahun 2016 menerbitkan dokumen mengenai keterkaitan profesi akuntan dalam melaksanakan agenda SDGs. Berdasarkan IFAC, Makarenko dan Plastun (2017) membuat sebuah peta kontribusi profesi akuntan dalam SDGs yang menjelaskan bahwa beberapa tujuan-tujuan tersebut memiliki hubungan dengan profesi akuntan. Agenda ini bisa mempengaruhi prestasi dari profesi akuntan itu sendiridan menjadi tantangan baru pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan.

Tabel 4.1

Pemetaan SDGs

Tujuan	No. Target	Kontribusi
4. Pendidikan Berkualitas	4.3	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
	4.6	Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan

		literasi dan numerasi.
5. Kesetaraan Gender	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di Negara berkembang.
	8.3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	9.4	Meningkatkan infrastruktur dan <i>retrofit</i> industry untuk menjadikan industri berkelanjutan, dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang meningkat dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua Negara sesuai kemampuan masing-masing.
	9.5a	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara kurang berkembang terkurung daratan dan negara berkembang pulau kecil.
12. Konsumsi dan yang Bertanggung	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi

Jawab		praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
13. Penanganan Perubahan Iklim	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
	13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
	13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan perubahan iklim.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Sumber : (Kementerian PPN/ Bappenas, 2017)

4.3 Peran Bidang Akuntansi dalam Mewujudkan Pendidikan Yang

Berkualitas

Majunya suatu negara bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas, kualitas yang baik berasal dari pendidikan yang baik pula dimana, pendidikan berkualitas adalah sistem pendidikan yang mengenalkan kepada para pelajar dalam mengembangkan semangat kebersamaan untuk mempelajari dan menguasai akademis sesuai targetnya, mengetahui nilai-nilai ajaran agama serta memiliki kepekaan dalam terjun di kehidupan bermasyarakat berbasis, yang mana informasi dan teknologi di masa saat ini terus meningkat. Hak atas pendidikan pun telah

ditetapkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan harus dapat diakses secara setara oleh semua orang terutama di tingkat dasar. Adapun upaya dilakukan pemerintah dalam menyetarakan pendidikan di negara Indonesia dengan bantuan berbagai pihak dan salah satunya tenaga akuntan sendiri.

Adapun upaya yang terus dikembangkan oleh para akuntan diseluruh Indonesia dalam menyetarakan pendidikan yang berkualitas bagi semua gender yang telah dirangkum atas jawaban oleh kedua informan yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

"Dalam bidang akuntansi keuangan pemerataan pendidikan saat terus dikembangkan, adapun langkah yang terus diupayakan dalam penganggaran pendidikan tercapai, dimana selalu mengikuti instruksi pemerintah berdasarkan prosedur yang ditetapkan, jadi disini lembaga pengelola keuangan hanya selalu menyediakan anggaran dalam mengupayakan kesetaraan pendidikan".

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

"Untuk penganggaran sendiri selalu mengupayakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, terkhusus untuk pendidikan dana yang dianggarkan akan diberikan kepada dinas terkait kemudian dikelola sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tentu saja dengan selalu memastikan dana yang dianggarkan tepat sasaran sehingga tidak ada kekeliruan yang akan timbul dikemudian hari".

Dari pernyataan diungkapkan oleh kedua informan bahwa untuk mencapai tujuan dalam mengupayakan kesetaraan pendidikan bagi semua orang mengikuti instruksi dari pemerintah, dimana para akuntan berlelaku sebagai yang mengelola dan menganggarkan dana selalu mengikuti arahan yang diberikan, kemudian mengalokasikan dana kepada dinas-dinas terkait untuk mengelola dana tersebut

dengan tetap berpacu kepada keteapan yang ada sehingga tidak terjadi penyalahgunaan, kembali lagi kepada dinas terkait, yang dimaksud disini ialah bagaimana dinas terkait memenuhi apa yang ditargetkan dalam menyelesaikan segala masalah pendidikan yang ada.

Kemudian peran akuntan terus berlanjut ke poin mengupayanupaya yang dilakukan akuntan agar remaja atau kelompok dewasa dapat memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik, yang telah dirangkum dari dua informan yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Seperti hal yang sama dalam mengupayakan kesetaraan pendidikan, dalam meningkatkan kemampuan belajar baik literasi dan numerasi akuntan juga turut mengambil peran, sebagai badan pengelola keuangan akan berupaya dalam penganggaran, jadi disini kembali lagi bagaimana dinas terkait bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran yang diberikan secara baik, kemudian sebagai bukti kebenaran tentu saja ada bukti pelaporan kembali kepada lembaga terhadap dana yang dianggarkan dalam mengelola pendidikan yang baik”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Sama seperti sebelumnya dalam bidang penganggaran dibutuhkan *feedback* terkait dana yang diberikan kepada dinas terkait, sebagaimana tujuan yang disepakati baik dalam pendidikan ini, kemudian laporan yang diterima pula berisi apa yang akan dicapai seperti kemampuan literasi dan numerasi remaja dan kelompok dewasa juga harus dilaporkan sebagai bukti kebenaran dan pencapaian dari dinas yang diberi amanah”.

4.4 Peran Bidang Akuntansi dalam Mencapai Kesetaraan Gender

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, yang terjadi saat ini kesetaraan gender di berbagai tempat masih menjadi problematika yang terus

menjadi perhatian sehingga dalam program SDGs pun membahas perihal masalah ini.

Kesenjangan gender yang ada saat ini masih dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan memikul beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu telah merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri., pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua mau-pun muda, oleh karena itu semua peran profesi sangat diperlukan dalam hal ini, adapun peran yang dapat dijelaskan oleh profesi akuntan mengenai kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat yang telah dirangkum dari dua informan dibidangnya yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Tentu saja ada kesempatan yang sama untuk semua orang, tetapi kembali lagi kepada persyaratan yang berlakukan dari pimpinan dalam mengalokasikan gender sesuai bidangnya, kemudian secara teknis sebagai bidang pelaporan cuma bisa menunggu kesepakatan yang disepakati kemudian diberikan kepada eksekutor yang bertanggung jawab”.

2. Informan Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“Sesuai seperti dijalankan sekarang, kesempatan untuk perempuan dalam memimpin semakin terbuka, tapi dalam menduduki sebuah kedudukan atas tentu saja banyak proses yang harus dilaksanakan, ini agar membuktikan bahwa perempuan juga bisa dalam mengambil keputusan baik dalam politik, ekonomi maupun bermasyarakat.”

Dari kedua informan dalam bidang pelaporan dan umum dimana beliau perempuan yang berlaku sebagai kepala sub bidang, membuktikan bahwa saat ini kesempatan bagi perempuan untuk memimpin terlihat pasti, tapi dalam mendapatkan posisi baik laki-laki maupun perempuan harus menjalani proses yang panjang dalam mendapatkan hak yang dimaksud, jadi saat ini kesempatan untuk perempuan dalam pengambilan keputusan telah diakui secara baik.

Pada kongres VIII IAI dikatakan bahwa kedudukan perempuan di dalam organisasi harus dilaporkan dan dimasukkan kedalam sistem pelaporan, dimana telah dirangkum dari dua informan yang sama mengenai hal ini yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Dalam tingkat daerah sendiri sudah harusnya memasukkan perempuan dalam pelaporan, dimana dalam pelaporan menyesuaikan keadaan yang sebenarnya maksudnya laporan harus komprehensif sesuai dengan keadaan lalu di perluas jangkauannya sehingga bukan cuma dalam pencatatan angka-angka saja tetapi realisasinya yang didapatkan dari kenyataan yang ada bagi perempuan dalam sebuah organisasi”.

2. Informan Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“Yang terjadi dan dialami saat ini ialah benar kedudukan perempuan telah dilaporkan dan dimasukkan dalam laporan, dimana buat perempuan apa yang mereka lakukan sesuai capaian yang bisa dilaksanakan, kembali lagi dalam pelaporan yang dilakukan seperti BPKAD sendiri telah menerapkan pelaporan yang baik atas kedudukan perempuan yang diberikan.”

Dari kedua informan yang telah diberikan membuktikan bagian pelaporan telah memasukkan kedudukan perempuan di laporan dan dalam kasus sub bagian umum selaku perempuan telah menerima keadaan yang ada bahwa kedudukan perempuan telah diakui dan dapat di laporkan dalam sistem pelaporan, kedua pernyataan ini membuktikan kesetaraan gender yang terjadi saat ini mulai kearah yang lebih baik.

4.5 Peran Akuntan dalam Meningkatkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari permasalahan kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus terjadi, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada pembatasan kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama, menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan

kerja produktif serta kerja layak untuk semua”.Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya peran aktif dari pemerintah dan bantuan berbagai pihak untuk menangani permasalahan ini, termasuk peran akuntan yang memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah diungkapkan oleh kedua informan yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Dalam menjalankan peran akuntan tidak luput dari pengelolaan data, dari bagaimana laporan itu didapatkan, kemudian untuk memastikan pertumbuhan ekonomi telah berjalan harus berdasarkan bukti dari lapangan yang memperlihatkan bahwa alokasi dana yang diberikan telah tepat sasaran”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Untuk penganggaran sendiri dalam tugasnya hanya memberikan dana berdasarkan apa yang dibutuhkan, jadi dalam perbaikan ekonomi harus meninjau dari laporan yang diterima dari lapangan kemudian memastikannya kebutuhannya, setelah meninjau berbagai hal lalu diputuskanlah untuk penyelesaiannya”.

Dari pernyataan kedua informan menjelaskan bagaimana pandangan dari bidang masing-masing yang dapat dikaitkan keduanya bergantung pada laporan yang diterima untuk memastikan dalam mengalokasikan dana harus sesuai dari bukti lapangan yang ada.

Kemudian terkhusus BPKAD sendiri dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, telah dijawab oleh kedua informan mengenai hal ini yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Seperti dengan tanggapan sebelumnya setelah semua laporan diterima kemudian pelaporan memastikan alokasi yang dianggarkan apakah telah tepat sasaran pada target yang ditunjukkan, kemudian setelah diyakin bahwa tujuan telah dicapai benar adanya, kemudian proses selanjutnya ialah mempertahankan pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan agar dapat memiliki keuntungan jangka panjang yang terus berjalan”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Dalam jawaban ini tidak bisa memaparkan terlalu banyak secara signifikan dalam hal ini untuk bidang penganggaran sendiri cuma bisa memastikan alokasi dana yang diberikan telah tepat sasaran, untuk selebihnya bagian pelaporan akan lebih memperhatikan apakah yang dianggarkan sudah tepat sasaran seperti yang dibutuhkan”.

Dari pernyataan kedua informan memperlihatkan kesinambungan pekerjaan bagi keduanya, seperti mengalokasikan dana untuk keperluan ekonomi kemudian terus memastikan ekonomi yang terjadi setelahnya berkembang dengan melihat laporan yang didapatkan dari lokasi.

Kemudian dalam menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif dan penciptaan lapangan kerja diberbagai sektor, peran akuntan dalam hal ini badan pengelola keuangan memiliki peran yang mendukung yang telah diungkapkan oleh kedua informan mengenai hal ini yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Hal ini sebelumnya berlanjut lagi dari pertanyaan sebelumnya dimana untuk BPKAD sendiri terkhusus bagian pelaporan yang menanggapi hal ini sama saja, dari memastikan alokasi dana yang tepat sasaran, dimana tertuju kepada apa yang dibutuhkan, kemudian jika ada yang akan memulai dari awal harus memulai dengan memasukkan proposal sesuai apa yang bisa dianggarkan”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Tidak banyak yang bisa dijawab hal ini lagi, tetapi dalam mendukung kebijakan ini bagian penganggaran akan berlaku adil dan semestinya dari laporan yang ada untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik”.

Berdasarkan dari penjelasan kedua informan dapat disimpulkan bahwa keduanya berlaku mendukung dalam kegiatan produktif dan penciptaan lapangan kerja dimana keduanya memamparkan jawaban mereka dari bidang masing-masing yang membuktikan upaya yang dilakukan terus berkesinambungan.

4.6 Peran Akuntan dalam Membangun Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Investasi berkelanjutan dalam infratraktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting, begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah

dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

Investasi pada infrastruktur dan inovasi adalah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan, baik dalam bidang akuntansi sendiri sangat di perlukan peran para akuntan yang handal dalam melaksanakan tujuan ini, kemudian dalam akuntan sendiri ada langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri yang dimana telah dijawab oleh kedua informan yang mengenai perihal ini yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Untuk bidang akuntansi sendiri dalam memberdayakan UMKM mengupayakan usaha semua masyarakat terus berjalan dengan baik, tapi sebelum itu poin penting yang perlu diperhatikan terus ialah pembenahan infrastruktur, dengan lebih mengutamakan agar semua kegiatan distribusi berjalan dengan lancar dan ini juga imbasnya ke para UMKM itu sendiri”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Untuk bagian penganggaran sendiri sama seperti sebelumnya, memberikan atau mengalokasikan dana yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur yang diperlukan untuk membatu pengindistribusian para pelaku usaha dalam berwirausaha”.

Dari kedua informan memaparkan bahwa dalam menjalankan atau meningkatkan infrastruktur selalu berpacu atas landasan yang diberikan jadi setiap membangun infrastruktur tentu saja telah memikirkan fungsional dari yang dibangun kemudian target yang ditujukan terbantu dari pembangunan yang dilakukan.

Kemudian sebagai tugas dari badan pengelola keuangan dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara

berkembang adapun upaya yang telah dilakukan dimana telah dijawab oleh kedua informan yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Bicara dalam mengupayakan tentu saja dari semua hal yang dibahas tadi sudah menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh akuntan atau badan pengelola keuangan, tinggal kedepannya bagaimana terus memastikan apakah yang di laporkan telah tepat sasaran dan juga memastikan dalam mengalokasikan dana tidak asal dilakukan tentu saja harus berlandaskan pada kerangka acuan yang ada”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Sama seperti sebelumnya tupoksi dalam penganggaran selalu berperan dalam menganggarkan dana sesuai yang dibutuhkan di lapangan, untuk melaksanakan semua hal tersebut tentu saja harus melewati tahapan-tahapan yang ada dan memutuskan keputusan perihal infrastruktur yang akan dibangun”.

Berdasarkan jawaban dari kedua informan di mana keduanya menjawab sesuai keahlian di bidang masing-masing dimana dalam melaksanakan pembangunan harus melewati proses yang ditetapkan, kemudian memastikan kebenaran yang terjadi saat pembangunan baru dimulai hingga selesai dengan sesuai target yang di anggarkan.

4.7 Peran Bidang Akuntansi dalam Meningkatkan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pertanian adalah pengguna air terbesar di seluruh dunia, dan saat ini irigasi mengambil

sekitar 70 persen penggunaan air bersih yang layak digunakan manusia, masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi kebutuhan dasarnya pun belum bisa dikatakan layak. Mengurangi sisa makanan perkapita global dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ekonomi dengan sumber daya efisien, tidak lepas juga dari peran akuntan dalam menangani perihal masalah ini dimana salah satu peran akuntan ialah sebagai pendorong bagi perusahaan untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan yang telah diungkapkan oleh kedua informan yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Tentu hal ini buat lembaga keuangan tidak bisa bergerak sendiri jadi dalam peran akuntan selain pelaporan juga harus bisa mengait para *stakeholder*, agar dapat meningkatkan cara praktek dan mengintegrasikan informasi dalam siklus pelaporan mereka, juga agar apa yang diterapkan sekarang menjadi lebih mudah dimengerti dengan keterkaitannya dengan keadaan yang sekarang harus lebih bisa meningkatkan dalam cara produksi pelaku usaha”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Untuk bidang penganggaran sendiri tidak bisa menjelaskan terlalu banyak perihal hal ini, tapi sepaham dari jalan kerja akuntan yang ada tentu saja dalam mengajak para perusahaan lain agar lebih memperhatikan siklus pelaporan mereka, baik dari kerjasama antara BPKAD sendiri atau dari lembaga akuntan yang lebih berpengalaman itu jua untuk mengatur pelaporan produksi yang lebih baik dan teratur sesuai yang diterapkan saat ini”.

Kedua informan menyatakan pendapat yang sama dalam bagaimana mengait perusahaan-perusahaan lain dalam meningkatkan praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi dalam pelaporan pelaku usaha kearah yang lebih baik untuk saat ini.

4.8 Peran Bidang Akuntansi Dalam Penanganan Perubahan Iklim

Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan, Memperkuat kegigihan dan kapasitas adaptasi wilayah-wilayah yang lebih rentan, seperti negara-negara di tengah benua dan negara kepulauan, harus berjalan beriringan dengan usaha meningkatkan kesadaran dan memasukkan langkah-langkahnya pada kebijakan dan strategi nasional. Dengan adanya kehendak politik dan penggunaan langkah teknologi secara luas, masih mungkin bagi kita untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata secara global pada dua derajat Celcius di atas level masa pra-industri. Ini membutuhkan tindakan bersama dengan segera. Baik profesi akuntan sendiri dimana juga memiliki peran menangani masalah perubahan iklim dalam memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya iklim dan bencana alam dalam negeri yang telah di jawab oleh kedua informan mengenai masalah ini yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Sama seperti sebelumnya dalam perubahan iklim sendiri ini ada kaitannya dalam membangun infrastruktur menjadi kearah yang lebih baik, meninjau keadaan alam Kota Palopo yang sulit ditebak saat ini, tentu saja perlu lagi pengalokasian dana dalam mengatasi atau mengurangi dampak bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Seperti dalam mengatasi permasalahan lainnya dalam mengatasi perubahan iklim pun untuk bidang penganggaran sendiri akan lebih fokus meninjau kebutuhan yang diperlukan dalam mengatasi iklim yang terjadi, baik bencana alam atau mengurangi dampak perubahan iklim itu sendiri, jadi untuk menganggarkan infrastruktur perlu lagi melakukan riset terkait apa saja yang akan diperlukan dan melakukan penganggaran sesuai yang dibutuhkan”.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh kedua informan terkait menangani peran mereka dalam mengatasi perubahan iklim, keduanya sama-sama menyatakan pelaporan yang ditujukan untuk membangun infrastruktur terkait dalam perubahan iklim dan menganggarkan sesuai yang ditargetkan.

Kemudian melihat peran aktif akuntan dalam mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional dimana telah dijelaskan oleh kedua informan mengenai hal ini yakni:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Tentu akuntan juga berpengaruh atas tindakan ini, untuk melihat pembangunan infrastruktur itu sendiri harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, baik dalam menangani perubahan iklim harus ada yang dipertimbangkan lebih baik sehingga seperti yang terus diulang-ulang dalam menangani segala masalah sebelumnya perlu tahap perencanaan yang berdasarkan pencatatan atau panduan yang ditetapkan”.

2. Informan Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

“Untuk penganggaran sendiri tentu juga sudah termasuk dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan tentu sudah ada dalam peraturan dan strategi atau perencanaan tentu saja akan dibahas lebih lanjut saat membangun infrastruktur yang terkait dalam perubahan iklim saat ini”.

Kedua pendapat yang diungkapkan oleh kedua informan mengenai permasalahan tindakan antisipasi, strategi dan perencanaan dalam perubahan iklim tetap mengikuti arahan yang telah ditetapkan jadi selalu meninjau perubahan yang ada dan terus mengupayakan dalam meningkatkan dalam menangani perubahan iklim itu sendiri.

Kemudian dalam lingkup Kota Palopo dalam pendidikan, penumbuhan kesadaran serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringantan dini perubahan iklim telah berkembang kearah yang lebih baik, ini diungkapkan oleh kedua informan yang telah mereka jelaskan dimana:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Mulai ke arah yang lebih baik dimana pola pikir masyarakat Kota Palopo untuk meninjau kondisi alam saat ini menjadi dasar dalam bertindak, dimana diketahui curah hujan yang cukup tinggi menjadi hal yang menyadarkan masyarakat agar lebih berantisipasi, baik menangani bencana alam yang akan timbul, itu semua telah dimiliki atau terus ditingkatkan oleh masyarakat Kota Palopo sendiri”.

2. Informan Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“Untuk masyarakat Kota Palopo sendiri telah memiliki pola pikir yang lebih maju dalam melihat kondisi lingkungan, tingkat kesadaran semua masyarakat menjadi lebih meningkat terhadap perubahan cuaca yang sulit ditebak dan banyak yang mulai berantisipasi dalam bertindak dengan perubahan iklim yang akan terus menerus terjadi tiap waktunya”.

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua informan baik dalam bidang akuntan atau lembaga pengelola keuangan maupun bidang umum menyatakan pola pikir kesadaran baik masyarakat umum dan lembaga yang ada di Kota Palopo telah lebih mengarah ke yang lebih baik dan terus dalam peningkatan kesadaran antisipasi yang akan terus terjadi terhadap perubahan iklim.

4.9 Peran Bidang Akuntansi dalam Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui.

SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalannya proses ini, selain juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global, adapun dalam membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, tidak luput juga peran semua para profesi dalam membangun hal ini baik profesi akuntan dalam mengurangi korupsi dan penyuaipan dalam bentuknya

telah berjalan sesuai yang diharapkan yang dijelaskan oleh kedua informan berikut ini:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Berbicara untuk badan pengelola keuangan dan lembaga lainnya di kota Palopo sendiri pastinya telah diawasi oleh rambu-rambu yang ada atau peraturan dari lembaga yang menangani kasus korupsi, tapi disini jika dilihat ke lingkup yang lebih luas masih ada saja oknum yang melakukan pelanggaran tanpa takut akan aturan yang ditetapkan, jadi apa yang diterapkan saat ini bergantung lagi kembali kepada kesadaran atau pola pikir dari berbagai pihak itu sendiri”.

2. Informan Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“Melihat keadaan untuk kantor BPKAD sendiri tentu saja sudah diperketat dengan peraturan, tetapi dalam jangkauan luas seperti seluruh daerah, lembaga keuangan pasti diawasi oleh aturan yang tegas tentang permasalahan ini, tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing apakah bisa menjaga nama baik lembaganya atau cepat terpengaruh oleh pendapatan yang besar bila melakukan hal tersebut”.

Dari jawaban yang disampaikan informan jika meninjau permasalahan korupsi dan penyuapan dalam bentuknya telah mengarah ke arah yang cukup baik, dimana lembaga keuangan telah diawasi oleh aturan dari pihak yang berwajib jikalau ada kasus korupsi dan lainnya yang terjadi, tetapi disini informan menekankan kesadaran ke para pejabat yang berlaku dimana walaupun telah diawasi secara ketat tetap saja akan ada kasus yang terjadi, akibat dari kurangnya kesadaran dan mental orang-orang yang cepat terpengaruh terhadap kondisi yang terjadi di lingkungannya.

Kemudian dalam mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat akuntan juga memiliki peran dimana telah dijelaskan oleh kedua informan berikut:

1. Informan Pertama Bidang Akuntansi dan Pelaporan

“Dalam mengembangkan lembaga tentu saja akuntan juga berpengaruh, untuk meningkatkan lembaga juga perlu bantuan berbagai pihak yang ada agar mendapatkan hasil yang lebih baik, kemudian selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada dimana kedepannya lebih banyak penyusaian terhadap pelaporan yang lebih efektif dan transparan ke semua tingkatnya”.

2. Informan Kedua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“Dalam akuntan sendiri memperkuat sistem keuangan akuntansi diperlukan untuk semua tingkat daerah, dalam artian yaitu membenahi diri agar menjadi contoh yang ba, terus meningkatkan kesadaran sumber daya manusia yang ada sehingga lebih memikirkan lembaga yang lebih terpacaya dan diakui”.

Kedua informan menekankan kepada sumber daya manusia dimana berkembangnya suatu lembaga yang efektif, akuntabel dan tranparan tentu saja semua pihak harus ikut adil, baik akuntan sendiri membenahi bidang mereka agar terus terpacaya dan selalu mengikuti perkembangan yang ada agar tidak tertinggal dalam menjalankan pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Terwujudnya semua tujuan SDGs di tahun 2030 dalam upaya menyejahterakan manusia, meningkatkan perekonomian dan perlindungan hidup, agenda mega global yang disepakati oleh para petinggi dunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ini megajak seluruh kalangan masyarakat baik yang bergerak di bidangnya masing-masing harus dapat berkontribusi, terkhusus profesi akuntan dalam hal ini badan pengelola keuangan daerah yang berkontribusi pada enam dari 17 tujuan SDGs yang ada, yaitu :

1. Tujuan Ke-4, Pendidikan Berkualitas. Pemerintah Indonesia melalui bantuan tenaga akuntan dalam mengelola keuangan dalam meningkatkan pendidikan menunjukkan komitmen yang baik. Hal ini mencakup antara lain penganggaran pendidikan seperti memiliki akses listrik, internet untuk tujuan pembelajaran, komputer untuk tujuan pembelajaran, sanitasi layak sesuai gender, air minum layak, dan alat cuci tangan layak.
2. Tujuan Ke-5, Kesenjangan Gender. Tantangan dalam meningkatkan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih kurang terlihat saat ini, baik usaha yang dilakukan pemerintah dan bantuan profesi akuntan.
3. Tujuan Ke-8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi yang stagnan saat ini disebabkan oleh tren penurunan

pertumbuhan ekonomi potensial yang dipicu oleh masih rendahnya tingkat produktivitas masih menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, kemudian masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum mampu merespon perkembangan pasar kerja menyebabkan produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal dan lambatnya penciptaan lapangan kerja formal masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan upaya akuntan atau badan pengelola keuangan daerah dalam mengait para pengusaha baru masih gencar untuk ditingkatkan.

4. Tujuan Ke-9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Untuk menunjang konektivitas dalam pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi ekonomi masih harus terus ditingkatkan, kemudian diperkuat dengan integrasi dari seluruh infrastruktur yang sudah ada, dan lembaga pengelola keuangan daerah juga harus mengusahakan alokasi anggaran yang lebih besar untuk litbang (riset), dan tidak hanya bergantung pada pendanaan pemerintah, namun diperluas untuk mendorong kerja sama pendanaan dengan pihak non-pemerintah seperti sektor swasta.
5. Tujuan Ke-12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. SDGs memungkinkan perusahaan untuk melaporkan informasi tentang kinerja pembangunan berkelanjutan menggunakan indikator umum dan serangkaian prioritas bersama, peran akuntan dalam hal ini sebagai pendorong bagi perusahaan untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan.

6. Tujuan Ke-13, Penanganan Perubahan Iklim. Sebagian besar wilayah di Indonesia masih termasuk ke dalam kategori risiko tinggi dengan kondisi jumlah kejadian bencana yang terus meningkat, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik ancaman multi bencana, peran akuntan dalam masalah ini ialah memperkuat kapasitas dan ketahanan bahaya iklim, kemudian mengambil tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.
7. Tujuan Ke-16, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Di antara berbagai capaian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh SDG16, yaitu pemberantasan korupsi yang belum optimal, serta pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif, kemudian tantangan dalam meningkatkan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di setiap tingkatan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya seperti masih cukup tingginya permisifitas terhadap praktik korupsi, kepatuhan lembaga pemerintah terhadap undang-undang pelayanan publik masih belum optimal sehingga pencegahan potensi maladministrasi dan perilaku koruptif masih belum sepenuhnya terjadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah tekah dilakukan oleh peneliti adapun keterbatasan yang ada selama melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Informan yang ada terbatas pada para pejabat kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kota Palopo sesuai target penelitian, yang

dimana Kota Palopo sendiri belum ada profesi akuntan independen yang menjabat atau memiliki lembaga tersendiri.

2. Informan yang ada memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi dan hanya menjawab berdasarkan bidang dan pengalaman yang dijabat sekarang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan dengan penelitian, maka saran yang dapat dirangkum oleh peneliti sebagai berikut:

1. Para informan yang ada pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendukung program agenda dunia SDGs ini, namun dalam keterbatasan memberikan informasi akan membenahi lagi perihal ini agar para peneliti yang akan datang mendapatkan informasi yang lebih baik lagi seperti yang disampaikan oleh salah satu informan dari kantor tersebut.
2. Dengan adanya penelitian ini harapannya bisa menjadi tambahan referensi bagi para peneliti berikutnya dalam mengangkat judul kasus yang terkait, dimana masih kurangnya secara umum informasi dan referensi mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ada di Indonesia khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Alagla, S., 2019. Governance and Auditing the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs): Challenges of the Preparedness Phase. *Int. Bus. Res.* 12, 98. <https://doi.org/10.5539/ibr.v12n4p98>
- Alisjahbana, Armida Salsiah Murniningtyas, E., 2018. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
- Ariastini, N.N., Semara, I.M.T., 2019. Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak. *J. Ilm. Hosp. Manag.* 9, 160–168. <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i2.155>
- BPK, 2021. peran-bpk-dalam-sdgs [WWW Document]. BADAN PEMERIKSA Keuang. REPUBLIK Indones. (BPK RI). URL <file:///C:/Users/User/Downloads/peran-bpk-dalam-sdgs.htm>
- BPKAD, 2020. BPKAD [WWW Document]. BPKAD PALOPO. URL <http://bpkad.palopokota.go.id/pages/Sejarah>
- CGMA, 2018. Creating a sustainable future: The role of the accountant in implementing the Sustainable Development Goals 32.
- Coşkun Aslan, M., Kısacık, H., 2017. Kurumsal Sürdürülebilirlik Çözümü: Üç Boyutlu Muhasebe. *Muhasebe ve Finans. Derg.* 18–34. <https://doi.org/10.25095/mufad.402214>
- Dr.farida Nugrahani, M.H., 2014. dalam *Penelitian Pendidikan Bahasa 1*, 305.
- Febriyanti, A., 2019. Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Di Era Ekonomi Digital 1, 105–112.
- Harry, S., 2018. Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga Tesis Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga 1–8.
- Hidayati, N., 2019. Kontribusi Inklusif Akuntan Dalam Mewujudkan Sustainable Developmet Goals 33–35.
- Irawan, F.B., 2019. Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. *Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc.* 26–35.
- Kementerian PPN/ Bappenas, 2017. Terjemahan Tujuan dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
- Kementerian PPN, 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals

(TPB/SDGs). Kementeri. PPN.

- Makarenko, I., Plastun, A., 2017. The role of accounting in sustainable development. *Account. Financ. Control* 1, 4–12. [https://doi.org/10.21511/afc.01\(2\).2017.01](https://doi.org/10.21511/afc.01(2).2017.01)
- Roda, A., Nilai, P., Azzahra, B., Akuntansi, D., Ekonomi, F., Indonesia, U., 2020. Perusahaan Melalui Artificial Intelligence & Tech Analytics Pada Era Disruptif. *J* 16.
- Soendari, T., 2018. Metode Penelitian Deskriptif. *Tjutju Soendari* 25.
- Syamsir, T., 2018. Organization and management. *Handb. Educ. Ideas Pract.* 377–518. <https://doi.org/10.4324/9781315717463-14>
- Wulandari, B.A., 2020. Pengaruh Peran Akuntan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Terhadap Kontribusi Akuntan Dalam Pengaruh Peran Akuntan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb). *Skripsi* 1–221.
- Yuningsih, A., 2007. Peran dan Komitmen Indonesia dalam “Millenium Development Goals”: (Perspektif Humas Internasional). *Mediat. J. Komun.* 8, 257–270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1246>